

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan pertanggung jawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan

serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.

Ambon, Januari 2026
Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Maluku,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" at the top and "DIREKTORAT JENDERAL PERhubungan DARAT" at the bottom. The inner circle of the stamp contains the text "BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT" and "KELAS II MALUKU". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "H. Hasan Bisri".

Drs. H. Hasan Bisri
NIP.196808181992031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	9
I.1 LATAR BELAKANG.....	9
I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	10
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA	13
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	15
I.4.1. Kewenangan.....	15
I.4.2. Sumber Daya Manusia	15
I.4.3. Anggaran.....	16
I.4.4. Isu Strategis	16
I.4.5. Ruang Lingkup.....	16
I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS	27
II.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	44
III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	44
III.3 REALISASI ANGGARAN.....	191
III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	199
III.3.3 Hambatan dan Kendala.....	203
BAB IV PENUTUP	204
IV.1 Penutup.....	204
1. Ringkasan Capaian.....	204
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	206

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Komposisi Pegawai BPTD Kelas II MALUKU Tahun 2025	14
Tabel II. 1 Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU Tahun 2025	27
Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	31
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas I MALUKU	11
Gambar III. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	56
Gambar III. 2 Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transpotasi Angkutan Jalan Tahun 2025.....	60
Gambar III. 5 Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025	66
Gambar III. 14 Realisasi Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025.....	84
Gambar III. 17 Realisasi Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025.....	90
Gambar III. 20 Realisasi Kegiatan Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ Tahun 2025	97
Gambar III. 23 Realisasi Kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025.....	104
Gambar III. 32 Realisasi Kegiatan Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan Tahun 2025.....	124
Gambar III. 35 Realisasi Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025	130
Gambar III. 38 Realisasi Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala Tahun 2025.....	136
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	139
Gambar III. 41 Realisasi Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025	142
Gambar III. 44 Realisasi Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025	148
Gambar III. 47 Realisasi Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025	155

Gambar III. 50 Realisasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025.....	161
Gambar III. 53 Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis Tahun 2025.....	167
Gambar III. 56 Realisasi Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) Tahun 2025	173
Gambar III. 59 Realisasi Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) Tahun 2025	178
Gambar III. 62 Realisasi Kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.....	184
Gambar III. 65 Realisasi Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Kelas II Maluku sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun LKIP sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKIP oleh BPTD Kelas II Maluku sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPTD Kelas II Maluku Tahun 2025 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulanan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku mempunyai 4 (empat) unit kerja Eselon IV, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Prasarana Jalan SDP
 3. Seksi Sarana dan Angkutan jalan, SDP
 4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

a. BPTD Kelas I;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. BPTD Kelas II;

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Transportasi Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. BPTD Kelas III.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Satuan Pelayanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipandan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelayakan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayanan perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelayakan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I. 3. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku sesuai dengan pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku menaungi sebanyak 172 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1 Pemetaan SDM BPTD Kelas II Maluku

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		PNS	CPNS	PPNPN
1	Subagian Tata Usaha	12	-	26
2	Seksi Prasarana Jalan, sungai,danau dan penyeberangan	5	2	8
3	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,Sungai,Danau dan Penyeberangan	12	1	3
4	Seksi Lalu Lintas Jalan,Sungai, Danau,Penyeberangan dan Pengawasan	11	1	5
5	Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	3	2	21
6	Pelabuhan Penyeberangan	17	-	43
Total		60	6	106

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1. Kewenangan

a. *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. *PM No. 122 Tahun 2018*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama dalam rangka penunjang pelaksanaan tupoksi sejalan dengan program kinerja yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II MALUKU hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Kelas I MALUKU adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
4. ODOL (Over Dimension Over Loading);
5. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
6. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
7. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.
8. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
9. Pengadaan subsidi perintis Damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Maluku;
10. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;
11. Peningkatan Kapasitas Jaringan Penyeberangan pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan;

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

1. SK 1.1.1 Meningkatkan Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK

a. IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

2. SK 1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan

a. IKK 1.2.1.B Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

3. SK 2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan

a. IKK 2.1.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

b. IKK 2.1.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

c. IKK 2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

4. SK 2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP**a. IKK 2.2.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM**

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

5. SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**a. IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata**

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

b. IKK 3.1.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

c. IKK 3.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029
- 7) Benchmark Nasional

6. SK 3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi *active* dan *passive safety***a. IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman**

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

b. IKK 3.2.2 Jumlah Alat uji yang telah dikalibrasi

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

7. SK 3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

a. IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada *Draft* Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

b. IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

- 1) Definisi Indikator Kinerja

- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada *Draft* Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

8. SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

a. IKK 4.1 Kegiatan perencanaan pembangunan Ditjen Perhubungan

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada *Draft* Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

b. IKK 4.2 Kegiatan terkait akuntabilitas kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada *Draft* Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

c. IKK 4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

d. IKK 4.4 Tingkat lanjut rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (Tindak Lanjut sampai Tahap Proses)

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

e. IKK 4.6 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

f. IKK 4.7 Kegiatan tata kelola pengadaan barang dan jasa

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

g. IKK 4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)

- 1) Definisi Indikator Kinerja
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- 4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- 5) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021
- 6) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Tahun 2025 Pada Draft Renstra BPTD Kelas I MALUKU 2025 – 2029

III.3 Realisasi Anggaran**III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025**

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 – 2025

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2025;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2025;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas I MALUKU Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2025 – 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Tabel II. 1 Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	11
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	24
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas	Kegiatan	3
			Pokok dan		
			Fungsi LLAJ		
		IKK 2.1.6	Penyusunan dokumen Teknis Terkait Tusi LLAJ	Dokumen	1
4.	SK 2.2 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	33
		IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi ASDP	Kegiatan	3
5.	SK 3.1 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	4

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	1
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	%	100
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	81,71
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan	%	82,11

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Anggaran Dit Teknis		
		IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	50
		IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80
		IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	8
		IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	4

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Wilayah Kelas II MALUKU Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPTD Tahun 2025-2029, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 BPTD Kelas II MALUKU mengalami penambahan terutama dalam hal penambahan sasaran kegiatan yang tercantum berdasarkan hasil perumusan revisi manual Indikator Kinerja Utama BPTD dan penyusunan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	100%
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	27
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100%
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50%
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100%
		IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Transportasi Darat				
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seiring adanya revisi manual Indikator Kinerja Utama yang berlaku di lingkungan BPTD dengan rincian sebagai berikut :

- Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	100%
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	27
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100%
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50%
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100%
		IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	95.029.524.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	4.122.568.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	20.748.827.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	22.510.838.000
5.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	19.119.786.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.797.706.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	11.222.080.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	11
2.	SK3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	10
3.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	27
4.	SK7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	1
		IKK 7.6	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4
		IKK 7.8	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Dokumen	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
6.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	2
		IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1
		IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1
		IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	1
		IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
		IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi	Kegiatan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
7.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	1
8.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis	%	100
		IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4
10.	SK13 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 13.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
		IKK 13.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen	Kegiatan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Perhubungan Darat		
		IKK 13.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	1
		IKK 13.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
		IKK 13.8	Tingkat Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan	Dokumen	1
		IKK 13.15	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK 13. 16	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifitas	Rp. 142.411.757.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 95.029.524.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 4.122.568.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 20.748.827.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 22.510.838.000
6.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.119.786.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 100.000.000
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.797.706.000
9.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 11.222.080.000
	TOTAL	Rp. 161.531.543.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	11
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP Jumlah Layanan	Lintasan	24
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	1
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ Monitoring dan	Kegiatan	3
			IKK 2.1.6	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1
	SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	33
			IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	3
5	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	4

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	1
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	%	100
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan	Lokasi	4
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	81,71
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	%	82,11
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor)	%	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	
8.	SK 4 Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai 80
		IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan 8
		IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan 4

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifita	Rp. 120.412.263.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 64.931.926.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 2.910.428.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 28.959.071.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 23.610.838.000
6.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 22.873.336.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 100.000.000
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.731.402.000
9.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 15.041.934.000
	TOTAL	Rp. 143.285.599.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku pada khususnya, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap perjanjian kinerja 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Maluku, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dari total 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD, bermuara pada terwujudnya 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2025- 2029.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian BPTD Kelas II MALUKU maka diperoleh data Capaian Kinerja adalah sebesar **100,00 %**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	11	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%
3	SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	27	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%
4	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			IKK 7.6	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			IKK 7.8	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
5	SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	33	33	33	100%	33	33	100%	33	33	100%
			IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	3	0	0	3	0	0	3	3	100%
			IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
7	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
8	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	%	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
			IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SK 13	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 13.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I MALUKU	Kegiatan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IKK 13.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPTD Kelas I MALUKU	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
							T	R	C	T	R	C	T	R	C
			IKK 13.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP BPTD Kelas I MALUKU	Kegiatan	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			IKK 13.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTD Kelas I MALUKU	Kegiatan	4	4	1	25	4	2	50	4	3	75
			IKK 13.8	Tingkat Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan	Dokumen	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
			IKK 13.15	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan BPTD Kelas I MALUKU	Kegiatan	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			IKK 13.22	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
					T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Rata Rata Persentase Capaian SK						39,2%			45,5%			51,3%
	Rata Rata Persentase Capaian IKK						31,81%			31,81%			63,63%
	Jumlah IKK Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK≥100%)						6			6			13
	Jumlah IKK Kurang Dari 100% (0%≤IKK<100%)						16			16			9

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
							T	R	C
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	11	11	11	100%
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	24	24	24	100%
3	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	1	1	1	100%
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	3	3	3	100%
			IKK 2.1.5	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen	1	1	1	100%
4.	SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	33	33	33	100%
			IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan	3	3	3	100%

	SK 3.1	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	4	4	4	100%
	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1	1	1	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	1	1	1	1
	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	%	100	100	100	100%
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	Lokasi	4	4	4	100%
	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	2	100%

			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	81.71	81.71	81.71	81.71
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	Nilai	82,11	82,11	82,11	100%
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	50	50	50	100%
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80	80	80	100%
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	8	8	8	100%
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	4	4	4	100%

Pada Tahun 2025, BPTD Kelas II Maluku memiliki 8 Sasaran Kegiatan (SK) yang didalamnya terdapat 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) . Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap Sasaran Kegiatan (SK) adalah sebagai berikut:

1. SK 1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 1.1.1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1) IKK 1.1.1.A Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan

Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan jalan adalah total rute, koridor, atau unit layanan angkutan umum yang didukung oleh anggaran pemerintah dalam satu tahun anggaran. Ini termasuk layanan seperti bus perintis yang beroperasi di daerah-daerah terpencil atau terisolasi.

Jumlah layanan subsidi ini menunjukkan seberapa luas cakupan program subsidi transportasi angkutan jalan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah ukuran dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan pemerataan layanan transportasi bagi masyarakat.

Data jumlah layanan subsidi dapat berubah setiap tahun berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal terkait, sehingga penting untuk memantau perkembangan program ini untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis.

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan program subsidi angkutan jalan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, BPTD bertugas untuk mengoperasikan dan mengelola layanan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah.

Dengan demikian, BPTD berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan angkutan jalan bagi masyarakat, terutama di daerah-

daerah yang sulit dijangkau.

Angkutan jalan perintis di daerah Maluku adalah layanan transportasi darat yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terisolasi di Maluku dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial. Layanan ini biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau swasta dengan dukungan subsidi dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah tersebut memiliki akses ke layanan transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan.

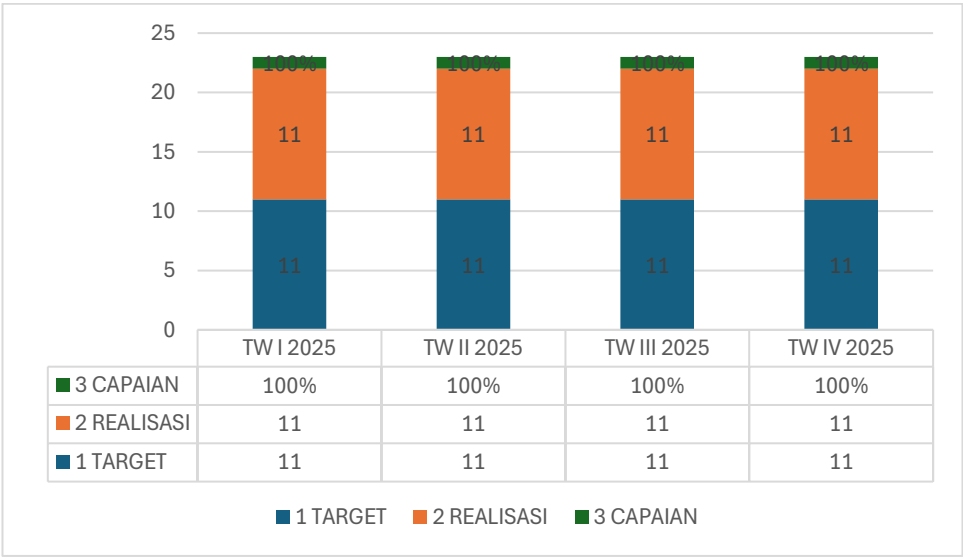
Di Maluku, angkutan jalan perintis sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dengan daerah lain. Angkutan jalan perintis di Maluku adalah bus perintis yang menghubungkan daerah-daerah kecil di kabupaten dengan kota-kota besar seperti Ambon. Layanan ini sangat vital bagi masyarakat Maluku, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses ke layanan transportasi.

Adapun jumlah layanan subsidi transportasi angkutan yang dilayani pada tahun anggaran 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebanyak 11 lintasan sebagai berikut:

1. Ambon – Alune
2. Ambon – Warasiwa
3. Ambon – Laimu
4. Ambon – Saka - Pasane
5. Langgur - Sathen - Danar - Madwear - Tetoat
6. Saumlaki – Latdalam
7. Saumlaki – Larat
8. Saumlaki – Watmuri
9. Saumlaki – Wermatang
10. Namlea – Teluk Bara
11. Namle – Savana Jaya

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebesar 11 (Sebelas) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 11 (Sebelas) maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 5958 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Jalan Perintis Tahun 2025, terdapat sebanyak 11 trayek yang di tetapkan di provinsi Maluku untuk di layani oleh keperintisan angkutan jalan.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terhadap Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK memiliki target sebanyak 11 trayek yang diperoleh berdasarkan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat,

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

- Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan angkutan perintis
- Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan.
- Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut.
- Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut.

d. Faktor Kegagalan

- Load Factor yang rendah
- Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya.
- Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.
- Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dalam setahun adalah 11 trayek jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 11 trayek maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari perhitungan berikut:

NO	Lintasan Trayek	Pagu	Kab/Kota	Umur Trayek (s.d 2025)	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	AMBON - ALUNE	4.245.230.000	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2025	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
2	AMBON - WARASIWA		KAB. MALUKU TENGAH	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2026	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
3	AMBON - LAIMU		KAB. MALUKU TENGAH	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2027	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
4	AMBON - SAKA - PASANEA		KAB. MALUKU TENGAH	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2028	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
5	LANGGUR - SATHEN - DANAR - MADWEAR - TETOAD		KOTA TUAL	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2029	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
6	SAUMLAKI - LATDALAM		KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2030	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
7	SAUMLAKI - LARAT		KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	9 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2031	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
8	SAUMLAKI - WATMURI		KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	7 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2032	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
9	SAUMLAKI - WERMATANG		KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	7 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2033	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
10	NAMLEA - TELUK BARA		KAB. BURU	4 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2034	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025
11	NAMLEA - SAVANA JAYA		KAB. BURU	7 TAHUN	PL.107/01/SP/PPK-LLAJ/BPTD KLS II MLK/2035	7 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025

NO	Lintasan Trayek	REALISASI LAYANAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS JANUARI-DESEMBER TAHUN 2025										
		Lintasan		Ritase		%	Load Factor		%	Jumlah Penumpang		%
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	AMBON - ALUNE	1	1	2.424	2.425	100%	13.818	32.583	236%	330	380	115%
2	AMBON - WARASIWA	1	1									
3	AMBON - LAIMU	1	1									
4	AMBON - SAKA - PASANEA	1	1									
5	LANGGUR - SATHEN - DANAR - MADWEAR - TETOAD	1	1									
6	SAUMLAKI - LATDALAM	1	1									
7	SAUMLAKI - LARAT	1	1									
8	SAUMLAKI - WATMURI	1	1									
9	SAUMLAKI - WERMATANG	1	1									
10	NAMLEA - TELUK BARA	1	1									
11	NAMLEA - SAVANA JAYA	1	1									
TOTAL		11	11									

IKK 1.1.1.A = Realisasi Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan dalam satu tahun anggaran

IKK 1.1.1.A = 11 Trayek

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 1.1.1.A = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 yaitu Rp 4.245.230.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 4.236.428.496,- atau mencapai 99,79%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II MALUKU akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui :

- Mempercepat proses verifikasi pembayaran agar anggaran yang tersedia dapat terserap sesuai rencana;
- Terus berupaya mengoptimalkan rute anggaran yang tersedia;
- Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

:

2. SK 1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 1.2.1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1) IKK 1.2.1.B Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

Jumlah layanan subsidi transportasi angkutan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada penyelenggara angkutan ASDP untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan transportasi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang memiliki jalur sungai, danau, atau penyeberangan.

Subsidi ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional angkutan ASDP, sehingga tarif yang dikenakan kepada penumpang dapat ditekan dan lebih terjangkau. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan transportasi, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan kesehatan.

ASDP sendiri merupakan moda transportasi yang sangat penting bagi masyarakat di daerah-daerah yang memiliki jalur air, karena dapat menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial. Dengan adanya subsidi transportasi angkutan ASDP, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut

1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Angkutan penyeberangan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) di daerah Maluku adalah layanan transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau di Maluku dengan kapal-kapal penyeberangan. Layanan ini dirancang untuk mengangkut kendaraan, penumpang, dan barang-barang lainnya antara pulau-pulau yang terpisah oleh laut.

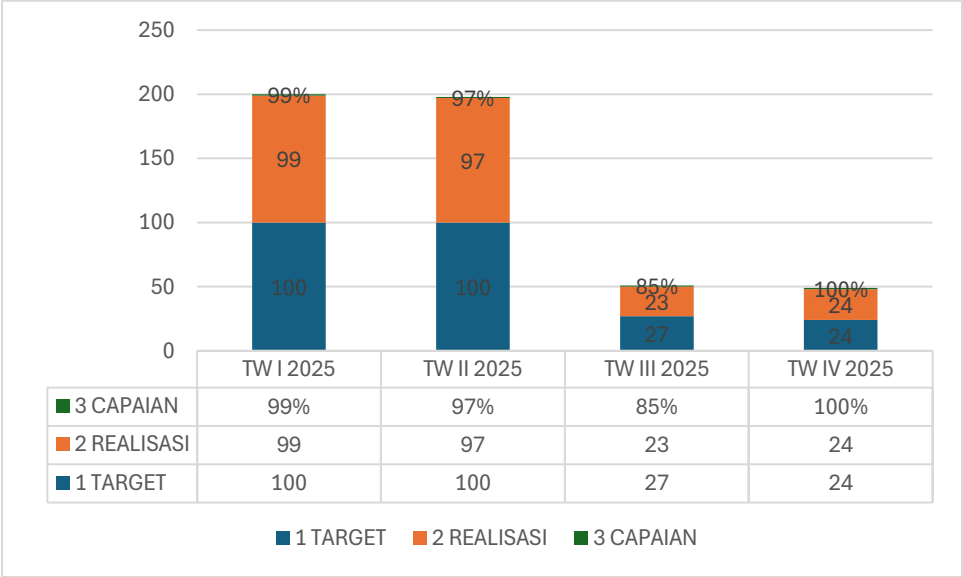
Di Maluku, angkutan penyeberangan ASDP sangat penting karena geografis wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Layanan ini membantu masyarakat untuk mengakses kebutuhan pokok, seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan, serta meningkatkan konektivitas dengan daerah lain.

Layanan subsidi angkutan penyeberangan ini dioperasikan oleh BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) dan perusahaan swasta lainnya yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan adanya angkutan penyeberangan ASDP, masyarakat Maluku dapat melakukan perjalanan antar pulau dengan lebih mudah dan nyaman.

Pada tahun 2025 terdapat 50 lintas perintis sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025, dan saat ini terdapat sebanyak 24 lintas yang berkontrak dan dioperasikan oleh 7 Armada kapal penyeberangan antara lain 6 kapal yang dioperasikan oleh PT. ASDP Persero dan 1 kapal yang dioperasikan oleh PD. PANCAKARYA.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 24 (dua puluh empat) Lintasan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 24 (dua puluh empat) Lintasan maka capaian kinerja mencapai 100%.. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk mengalokasikan anggaran dan memberikan subsidi dalam bentuk kompensasi kepada badan usaha seperti ASDP untuk penyelenggaraan layanan public;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Peraturan ini menegaskan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, termasuk dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang transportasi, yang mencakup layanan angkutan penyeberangan perintis;
- Peraturan Menteri yang mengatur skema dan perhitungan subsidi tahunan. Setiap tahun, pemerintah menerbitkan peraturan menteri baru yang mengikat operator seperti ASDP untuk menjalankan rute-rute perintis tertentu dengan alokasi subsidi dari APBN.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan. Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

c. Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan Ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk subsidi sangat penting. Keterlambatan pembayaran subsidi dari pemerintah dapat memengaruhi kelancaran operasional dan kualitas pelayanan;
- Peningkatan kepercayaan public yaitu Peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan ketepatan waktu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut, sehingga lebih banyak orang yang bersedia menggunakan layanan ini
- Pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah dan lembaga pengawas, termasuk DPR, memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan tepat sasaran

d. Faktor Kegagalan

- Ketidakjelasan jadwal yaitu Di beberapa rute perintis, terutama di daerah 3T, jadwal keberangkatan kapal sering kali tidak pasti atau mengalami keterlambatan. Ini dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada angkutan tersebut untuk beraktivitas dan mendistribusikan barang
- Pemangkasan anggaran subsidi atau Kebijakan pemerintah untuk memangkas subsidi transportasi dapat berdampak signifikan pada layanan perintis. Hal ini bisa mengganggu kontinuitas operasional dan memaksa ASDP untuk mengurangi frekuensi atau bahkan menutup beberapa rute yang kurang menguntungkan;
- Kondisi alam yang ekstrem yaitu Faktor cuaca seperti gelombang tinggi, badai, dan arus kuat di laut dapat mengganggu atau membatalkan pelayaran. Hal ini dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat dan mengganggu konektivitas

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP dalam setahun adalah 24 lintasan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 24 lintasan maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari analisis data dan perhitungan realisasi kinerja berikut

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{24}{24} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 yaitu Rp 9.327.759.000 ,-, dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 9.327.431.300,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Layanan Angkutan Penyebrangan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.008.051).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Kelas I MALUKU.

- Mengupayakan realisasi anggaran sesuai dengan jadwal atau RPD yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rute perintis yang ada untuk memastikan efektivitasnya. Dengan memanfaatkan data penggunaan, serta mengidentifikasi rute yang tidak efisien atau sudah dapat dilayani secara komersial, lalu membuka rute baru di wilayah yang lebih membutuhkan;
- Keterlibatan masyarakat dan evaluasi berkala: Membangun mekanisme umpan balik yang lebih efektif dari masyarakat di daerah 3T. Evaluasi layanan secara berkala dengan melibatkan pengguna jasa akan membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan riil Masyarakat

3. SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) 2.1 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu

a. IKK 2.1.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja

Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM merupakan kegiatan pelayanan pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB/jembatan timbang) yang bertugas melaksanakan penimbangan berat muatan, pemeriksaan dimensi kendaraan, penindakan otomatis terhadap pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Loading), pencatatan data secara *real-time*, serta sosialisasi kepatuhan angkutan barang

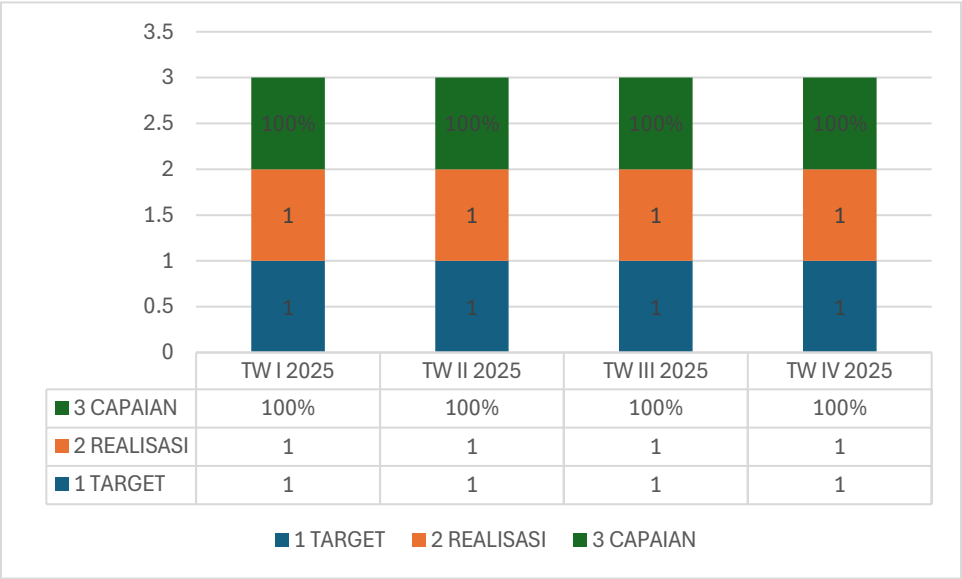
Standar pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) wajib memenuhi prinsip keselamatan, transparansi, dan efisiensi, mencakup pemeriksaan dimensi/berat muatan, penggunaan alat yang terkalibrasi, sistem penimbangan otomatis secara online (realtime), penindakan pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Loading), serta pengelolaan data terpusat.

Dalam pelaksanaan operasional layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) wajib menyediakan laporan kinerja secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penegakan aturan angkutan barang melalui jembatan timbang (UPPKB).

Adapun peran BPTD bertindak sebagai koordinator utama untuk menetapkan standar pelayanan, mengalokasikan sumber daya, mengawasi UPPKB, dan mengevaluasi realisasi layanan. Tujuannya agar fasilitas penimbangan dan pengujian kendaraan bermotor beroperasi tiap hari sesuai SPM layanan yang andal bagi pengemudi dan perlindungan nyata bagi infrastruktur jalan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM sebesar 1 (satu) Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (satu) Unit maka capaian kinerja mencapai 100% ($\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja}) \times 100\%$). Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja dibawah ini:



Gambar III. 16 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – dasar penindakan dan pengawasan muatan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang serta Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – memberi kewenangan kepada (BPTD) untuk mengelola UPPKB sejak 2017
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terhadap Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan memiliki target sebanyak 1 Unit yang diperoleh berdasarkan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

- Ketersediaan dan Kesiapan Infrastruktur (Fasilitas timbangan berfungsi baik (akurat, terkalibrasi, dan terpelihara, Peralatan pendukung seperti Weight in Motion (WIM), kamera pengawas, dan sistem pelaporan daring berfungsi optimal)
- Dukungan Anggaran dan Kebijakan (Alokasi dana APBN / DIPA mencukupi untuk operasional, perawatan, dan modernisasi fasilitas, Dukungan kebijakan BPTD dan Ditjen Hubdat dalam prioritas program pengendalian over dimension & over loading (ODOL).
- Kualitas SDM dan Manajemen Operasional (petugas UPPKB kompeten dan memiliki pelatihan sesuai standar, Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh BPTD dan Ditjen Hubdat);

- Integrasi Data dan Teknologi (Pemanfaatan sistem digital seperti Weighbridge Management System (WMS) atau Smart Weighbridge yang terhubung ke pusat data Kemenhub.)
- d. Faktor Kegagalan
 - Kerusakan atau Kalibrasi Timbangan Tidak Tepat Waktu (Fasilitas tidak bisa beroperasi sementara atau hasil penimbangan tidak valid)
 - Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan (Menghambat perbaikan atau penggantian peralatan rusak)
 - Kekurangan SDM dan Pergantian Personel yang Sering (Menurunkan konsistensi kualitas pelayanan);
 - Gangguan Sistem atau Integrasi Data Online (Menyulitkan pelaporan real-time dan pemantauan pusat);
 - Kendala Koordinasi Lintas Instansi (Kemenhub, Kepolisian, Pemerintah Daerah) Terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.
- e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM dalam setahun adalah 1 Unit jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Unit trayek maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari jumlah unit UPPKB yang telah dibangun dan beroperasi dalam tahun berjalan sebanyak 1 Unit yaitu UPPKB Passo.

IKK 2.1.4 = Realisasi Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM dalam tahun berjalan

IKK 2.1.4 = 1 Unit

- f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 2.1.4 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait pelaksanaan Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Rp. 1.343.128.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 1.213.896.873,- atau mencapai 90,38%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Melakukan perbaikan dan modernisasi fasilitas terminal yang sudah usang, seperti ruang tunggu, toilet, dan area keberangkatan/kedatangan, agar sesuai dengan SPM;
- Memastikan ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti jalur khusus, toilet, dan kursi roda, agar terminal dapat melayani semua lapisan Masyarakat;
- Menerapkan jadwal pembersihan rutin dan intensif di seluruh area terminal, terutama di fasilitas umum seperti toilet dan ruang tunggu;
- Menambah dan memelihara CCTV, detektor logam, dan petugas keamanan untuk menjamin keamanan penumpang dan ketertiban operasional terminal.

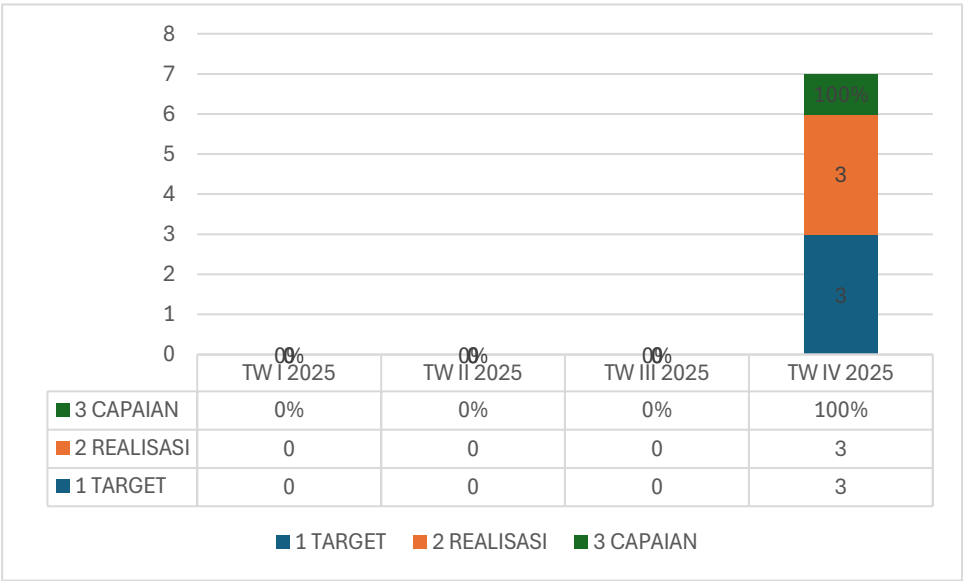
b. IKK 2.1.5 Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

1) Definisi Indikator Kinerja

Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ merupakan tugas bagian SDM dan Bidang LLAJ . Adapun kegiatan monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ yang dilaksanakan antara lain Evaluasi Beban Kerja Pegawai, pembinaan dan motivasi pegawai, kegiatan pengendalian lalu lintas event khusus, pengawasan evaluasi MRL, dan pengawasan evaluasi Andalalin.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ sebesar 3 (tiga) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3 (tiga) maka capaian kinerja mencapai 100% ($\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja}) \times 100\%$). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar III. 19 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Permenhub RI Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan perubahannya (termasuk PM 46/2016 dan PM 11/2017 Permenhub RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Permenhub RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat beserta perubahannya

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ memiliki target 7 (Kegiatan) yaitu :

- Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus
- Pengawasan Evaluasi MRL
- Pengawasan Evaluasi Andalalin
- Evaluasi Angkutan Orang
- Evaluasi Angkutan Barang
- Forum LLAJ

c. Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan dimulai dengan penetapan tujuan monev yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Indikator kinerja utama (KPI) yang relevan harus ditetapkan untuk mengukur progres secara akurat;
- Proses monev harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain program atau kebijakan, bukan kegiatan yang dipaksakan dari luar;
- Alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang cukup sejak awal memastikan pelaksanaan monev dapat berjalan efektif;

- Kegiatan perencanaan dan persiapan dalam penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang matang;
- Pelaporan penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah dilaksanakan tepat waktu kepada pimpinan;
- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bagian Lalu Lintas dan Pengawasan dengan Bidang Teknis di lingkungan BPTD Kelas I MALUKU dalam hal menyampaikan program kerja;
- Adanya dukungan dari pimpinan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Penyusun Rencana Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2025 serta Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

d. Faktor Kegagalan

- Pengumpulan data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau manipulatif akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Data yang terfragmentasi antar unit juga menghambat analisis yang menyeluruh;
- Proses monev sering kali dibarengi dengan beban administrasi yang tinggi dan birokratis. Hal ini dapat mengalihkan fokus petugas dari tugas pokok dan mengurangi efisiensi proses monev itu sendiri;
- Di beberapa daerah, masalah infrastruktur seperti akses jalan, jaringan internet, atau listrik yang tidak stabil dapat mengganggu proses pengumpulan data secara digital;
- Petugas yang tidak memiliki kompetensi dalam metodologi monev, pengolahan data, dan analisis akan menghasilkan laporan yang tidak mendalam dan tidak berguna untuk perbaikan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ diketahui bahwa :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Monev Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Monev Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Monitoring evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Ketata Usahaan Tahun 2025 yaitu Rp 768.256.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2.218.814.000,- sehingga realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 768.077.632,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana (4640.FAE.923.923.C) Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas (4640.FAE.923.923.D) Monitoring Pengendalian Lalu Lintas (4640.FAE.923.923.E) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis Keselamatan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 4640.FAE.923.923.H)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) monev yang jelas dan konsisten di seluruh unit kerja. Hal ini memastikan proses monev berjalan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Hasil monev harus digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan mengukur progres perbaikan;
- Melibatkan seluruh unit kerja dalam proses monev. Kerja sama antarunit akan memastikan pemahaman yang komprehensif tentang kendala yang dihadapi dan pengambilan keputusan yang tepat;
- Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemantauan, penanganan dan pengaturan terkait pengendalian lalu lintas pada masa event khusus 2025-2029;
- Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan dari hasil posko event khusus 2025-2029 dengan evaluasi dan analisis data sehingga menghasilkan rekomendasi teknis program kegiatan Posko event khusus 2025-2029 kepada pimpinan BPTD Kelas I MALUKU;
- Penyampaian dan laporan hasil Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus BPTD Kelas I MALUKU kepada Direktorat Jenderal Perhubungan.

4. SK 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK)2.2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu

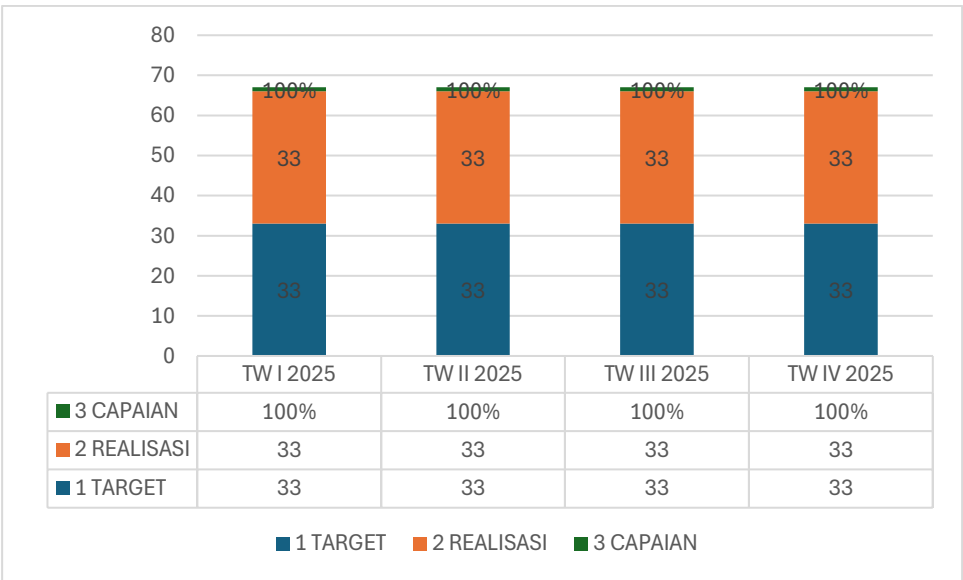
a. IKK 2.2.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, definisi operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup beberapa aspek utama Pengawasan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya SPM dalam kegiatan operasional angkutan tersebut.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM sebesar 33 (tiga puluh tiga) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 33 (tiga puluh tiga) maka capaian kinerja mencapai 100% ($\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja}) \times 100\%$). Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar III. 22 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011: Merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM BPTD Kelas I MALUKU memiliki target 5 yaitu operasional di 33 (tiga puluh tiga) pelabuhan SDP

c. Faktor Keberhasilan

Pencapaian SPM merupakan tolok ukur utama keberhasilan operasional pelabuhan sungai dan danau. SPM mencakup berbagai aspek, termasuk

keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan. Untuk mencapai SPM, pelabuhan harus mampu mengelola semua faktor di atas dengan baik.

Berikut adalah beberapa indikator kinerja pelabuhan yang relevan:

- Waktu yang dihabiskan kapal untuk menunggu pelayanan.
- Waktu yang dihabiskan untuk bongkar muat barang atau penumpang.
- Tingkat pemakaian dermaga: Efisiensi penggunaan dermaga.
- Kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan

d. Faktor Kegagalan

- Kurangnya pengawasan dan pembinaan: Minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah menyebabkan pengelolaan transportasi sungai dan danau menjadi kurang optimal.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): Kurangnya jumlah tenaga kerja yang memadai atau kompetensi yang kurang mumpuni di pelabuhan dapat menghambat kelancaran operasional.
- Masalah ketenagakerjaan: Adanya masalah ketenagakerjaan, seperti mogok kerja atau konflik, dapat mengganggu jadwal operasional.
- Sistem dan prosedur yang tidak jelas: Ketidakjelasan dalam prosedur operasional dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pelayanan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM diketahui bahwa:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Ops Sesuai SPM Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Ops Sesuai SPM Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{33}{33} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Rp 1.405.673.000,- dan terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 92.758.000 sehingga anggaran yang tersisa yaitu Rp 1.312.915.000 realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.312.825.495,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (4638.CDP.045.051.)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Mengembangkan sistem informasi untuk memantau data operasional secara real-time, seperti data produksi, jumlah hari operasi, jumlah trip, dan jumlah penumpang.
- Menerapkan sistem pemesanan tiket digital untuk mempermudah proses pembelian tiket dan mengurangi praktik percaloan. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna jasa, seperti sistem pengumuman digital atau aplikasi seluler yang terintegrasi

5. SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang Dan Barang

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 diukur melalui 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

a. IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang adalah tindakan pemeriksaan, pemantauan, dan penegakan terhadap kegiatan pengangkutan barang agar sesuai dengan izin, ketentuan teknis kendaraan, dan standar keselamatan lalu lintas.

Adapun Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I MALUKU yang dilaksanakan pada kegiatan ini:

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB
- Suport Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada titik lokasi rest area di toll wilayah MALUKU (Undangan terkait personil dan alat penunjang kegiatan)
- Suport Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada ruas jalan arteri wilayah MALUKU (Undangan terkait personil dan alat penunjang kegiatan)

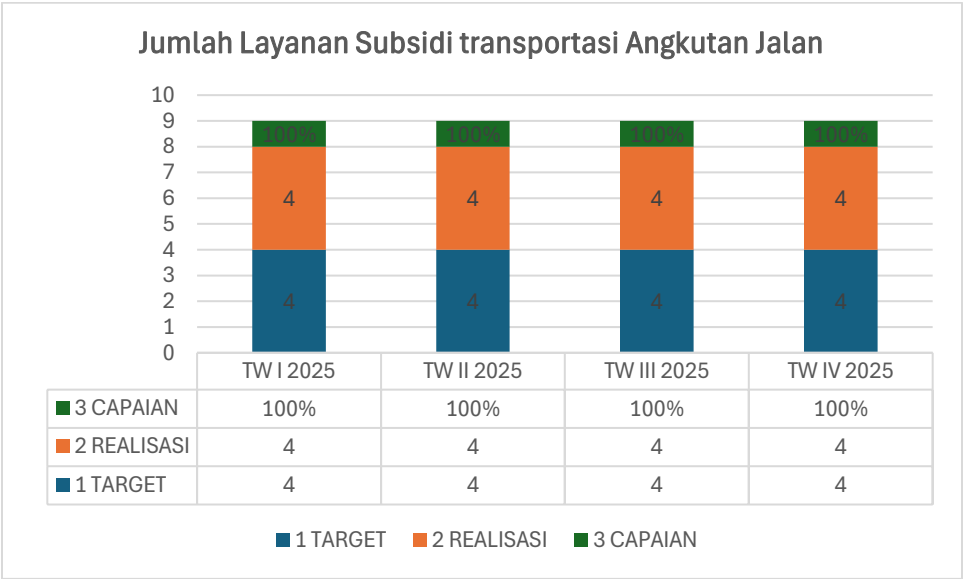
2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I MALUKU sebesar 4 (empat) berupa :

1. Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB (3 kegiatan)
2. Monitoring Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri (1 kegiatan)

jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 (empat) maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).



Gambar III. 28 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I MALUKU memiliki target 4 (empat) yaitu berupa :

- Monitoring Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada satuan pelayanan UPPKB (3 kegiatan);
- Monitoring Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri (1 kegiatan).

c. Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain :

- SDM pengawas kompeten dan tegas dalam penerapan aturan;
- Koordinasi kuat antara BPTD, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan daerah;
- Ketersediaan sarana dan peralatan pengawasan (mobil patroli, timbangan portabel, alat ukur dimensi);
- Sistem data dan pemantauan digital untuk mendeteksi pelanggaran ODOL;
- Kepatuhan dan kesadaran perusahaan angkutan terhadap aturan keselamatan;
- Dukungan anggaran dan kebijakan pimpinan yang berkesinambungan;
- Tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten (pembinaan dan sanksi tegas);
- Pemanfaatan sistem digital untuk registrasi dan verifikasi hasil produksi (SRUT);
- Pembinaan berkelanjutan bagi bengkel karoseri untuk meningkatkan mutu dan keselamatan kendaraan.

d. Faktor Kegagalan

Faktor Kegagalan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang :

- Kurangnya SDM dan sarana pengawasan di lapangan;
- Koordinasi antar instansi lemah dalam penegakan aturan ODOL;

- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan rutin dan penindakan;
- Data perizinan dan kendaraan tidak terintegrasi;
- Rendahnya kepatuhan operator dan sopir terhadap ketentuan muatan dan izin;
- Penegakan hukum belum konsisten atau berkelanjutan;
- Pengawasan tidak merata di seluruh wilayah dan waktu operasi;
- Data dan sistem registrasi bengkel belum terintegrasi;
- Kepatuhan bengkel rendah terhadap standar teknis dan administrasi.
- Pengawasan tidak rutin.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang diketahui bahwa:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pengawasan Ops Angbar Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pengawasan Ops Angbar Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional Angkutan Barang sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{4}{4} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Pengawasan Operasional Angkutan Barang sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 yaitu Rp 800.000.000,- dan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 799.995.375,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Over Dimension Over Loading (4640.FAE.923.923.G)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang BPTD Kelas I MALUKU, rencana kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan:

- Meningkatkan kompetensi dan jumlah petugas pengawas;
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pelaporan (sistem perizinan online);
- Memperkuat koordinasi lintas instansi (BPTD, Kepolisian, Dishub, dan asosiasi angkutan);
- Menambah sarana dan anggaran operasional pengawasan;
- Melakukan pembinaan rutin dan sosialisasi kepada bengkel karoseri;
- Menerapkan sanksi tegas dan konsisten bagi pelanggaran ODOL dan izin;
- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.

6. SK 3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active Dan Passive Safety

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.2 diukur melalui 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

a. IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

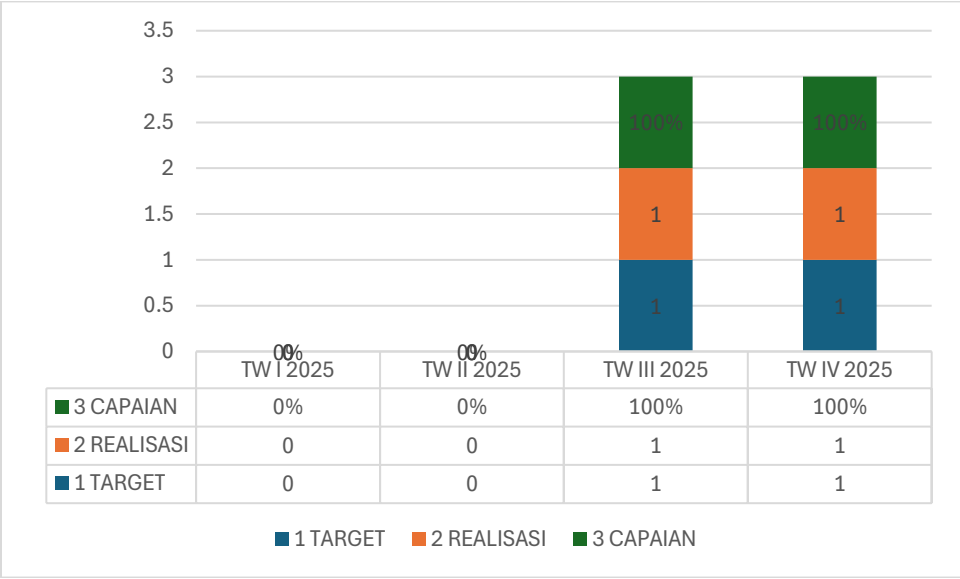
1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman merupakan proses evaluasi untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman BPTD Kelas II MALUKU sebesar 1 (satu), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1(satu) maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).Pencapaian ini digambarkan pada grafik dibawah ini :



Gambar III. 34 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/14/DRJD/2020 tentang Himbauan Pemasangan Bumper Belakang pada Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang Bak Muatan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DRJD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk memastikan kesesuaian desain dan peruntukan. Proses pengujian tipe dan rancang bangun kendaraan bermotor memerlukan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

c. Faktor Keberhasilan

- Pemenuhan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Penguji harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi rancang bangun;
- Dokumentasi yang lengkap dan akurat diperlukan untuk proses pemeriksaan dan sertifikasi;
- Kolaborasi dengan regulator atau kerjasama yang baik antara industri otomotif dan regulator memperlancar proses pengujian dan sertifikasi.

d. Faktor Kegagalan

- Ketidaksesuaian dengan regulasi atau konstruksi kendaraan tidak memenuhi standar dan regulasi yang berlaku;
- Kompetensi Penguji yang tidak memadai yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan;

- Kurangnya dokumentasi teknis yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses pemeriksaan dan sertifikasi.
- e. Perhitungan Realisasi Kinerja
Dari Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman diketahui bahwa:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pemeriksaan Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pemeriksaan Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%.

- f. Perhitungan Capaian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%.

- g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Adapun anggaran terkait kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 yaitu Rp 583.900.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 571.458.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 4.147.228,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan (4640.FAE.923.923.F).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

- Menganalisis kinerja saat ini untuk mengidentifikasi kekukarangan agar dapat segera di perbaiki;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya (SDM) dengan pengembangan kompetensi, ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, agar mampu melaksanakan tugas dengan baik;
- Memonitoring dan Evaluasi kinerja secara terus - menerus untuk meningkatkan pencapaian di masa yang akan datang.

b. IKK 3.2.2 Jumlah Alat uji yang telah dikalibrasi

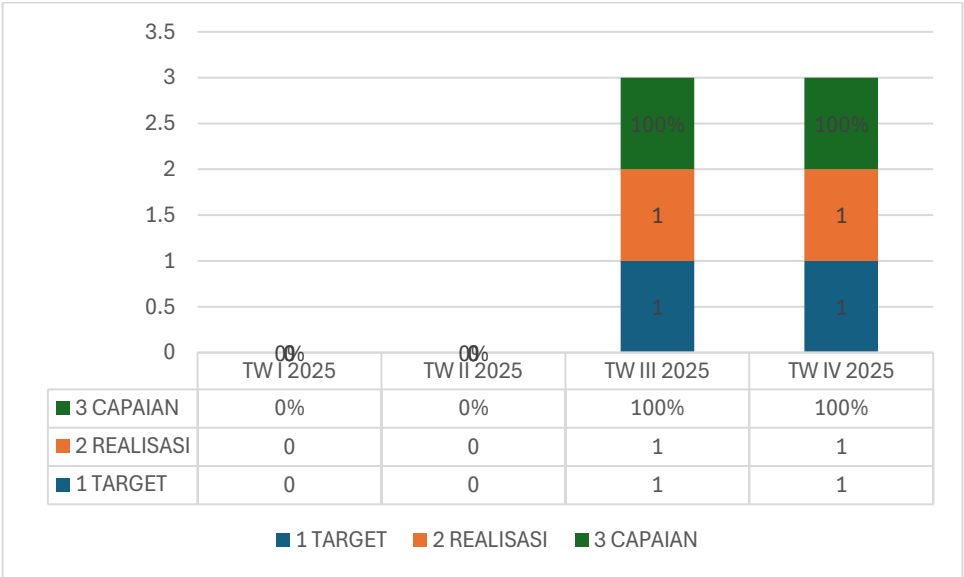
1) Definisi Indikator Kinerja

Uji kalibrasi alat uji berkala adalah proses verifikasi dan penyesuaian alat uji untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah BPTD Kelas II MALUKU sebesar 1 (Satu), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 (Satu), maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).



Gambar III. 37 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DRJD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan;
- Surat Himbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/14/DRJD/2020 tentang Himbauan Pemasangan Bumper Belakang pada Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang Bak Muatan.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor pada kegiatan *Jumlah Alat Uji yang Dikalibrasi* diawali dengan penetapan indikator dan target kinerja berdasarkan inventarisasi alat uji yang wajib dikalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja sebagai komitmen pimpinan unit kerja dalam rangka peningkatan akurasi dan keandalan alat uji. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi, disertai monitoring dan pengendalian terhadap capaian kinerja.

c. Faktor Keberhasilan

- Permohonan Kalibrasi menentukan jadwal pelaksanaan kalibrasi;
- Persiapan Alat memastikan alat uji dalam kondisi baik untuk kalibrasi;
- Pelaksanaan Kalibrasi melakukan kalibrasi dengan membandingkan hasil pengukuran alat uji terhadap standar referensi;
- Evaluasi Hasil: menganalisis hasil kalibrasi untuk menentukan kesesuaian alat uji dengan standar.

d. Faktor Kegagalan

- Kurangnya pemeliharaan alat dapat mengalami penurunan akurasi;
- Kesalahan prosedur kalibrasi yang tidak diikuti dengan benar dapat menyebabkan hasil kalibrasi tidak valid;
- Kerusakan alat uji dapat menyebabkan kegagalan kalibrasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Kegiatan Kalibrasi diketahui bahwa::

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kalibrasi Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Kalibrasi Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi Kegiatan kalibrasi sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait kinerja Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 yaitu Rp 583.900.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 571.458.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 8.294.455,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan (4640.FAE.923.923.F).

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV dalam pelaksanaan Kegiatan Jumlah Alat Uji yang dikalibrasi BPTD Kelas I MALUKU, rencana kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan:

- Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja untuk meningkatkan produktivitas;
- Mengembangkan Inovasi;
- Mengurangi resiko Kesalahan dan kecelakaan yang dapat terjadi akibat alat uji kalibrasi yang tidak akurat.

7. SK 3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

Dalam sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indicator kinerja kegiatan yaitu :

a. IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis

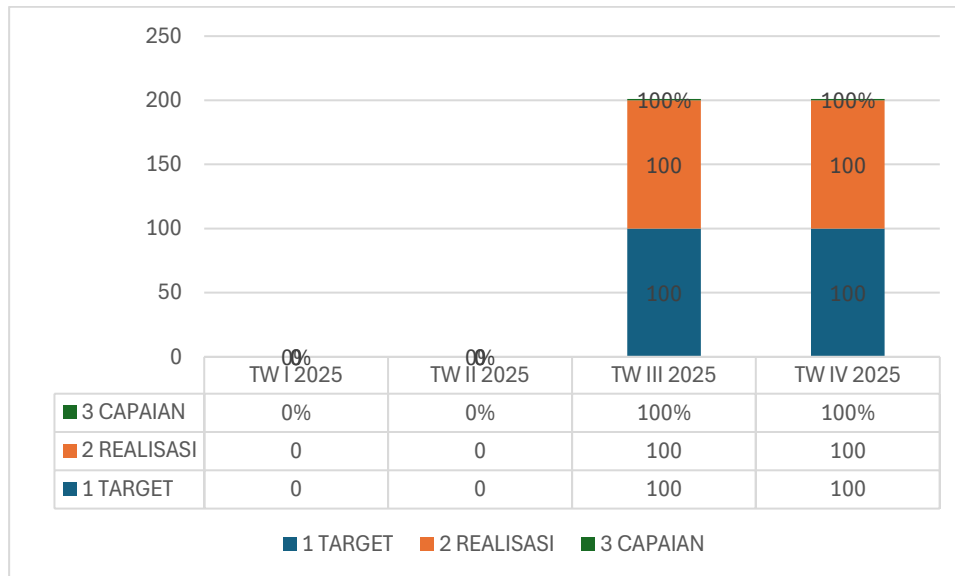
1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan, membangun, memasang, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan (seperti rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman, dan sebagainya) sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan lalu lintas.

Adapun Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis merupakan kegiatan operasional yang meliputi menyediakan, membangun, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis BPTD Kelas II MALUKU sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%
(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).



Gambar III. 40 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- SK Dirjen Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan
- PM Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan
- PM Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
- PM Nomor 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- PM Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- PM nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan
- PERDIRJEN HUBDAT NOMOR 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis marka Jalan
- KM PUPR Nomor 1688 Tahun 2022 tentang Jalan Nasional.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Berdasarkan Revisi PK tahun 2025, Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis BPTD Kelas I MALUKU memiliki target 23 (dua puluh tiga) yaitu menyediakan, membangun, dan/atau mengoperasikan perlengkapan jalan.

c. Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

- SDM pengawas kompeten dan tegas dalam penerapan aturan.
- Koordinasi kuat antar Instansi dan Stakeholder.
- Ketersediaan sarana dan peralatan pengawasan.
- Kepatuhan dan kesadaran perusahaan angkutan terhadap aturan keselamatan.
- Dukungan anggaran dan kebijakan pimpinan yang berkesinambungan.
- Tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten (pembinaan dan sanksi tegas).

d. Faktor Kegagalan

Faktor Kegagalan Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis :

- Kurangnya SDM dan sarana pengawasan di lapangan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi dan stakeholder.
- Minimnya anggaran operasional untuk kegiatan rutin dan pengawasan.
- Data yang tidak terintegrasi.
- Pengawasan tidak merata di seluruh wilayah dan waktu operasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis diketahui bahwa:

$$R_{\text{Realisasi Kinerja}} = \frac{\text{Jml Realisasi Peng Faskes Pada Tahun (n)}}{\text{Jml Peng Faskes Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

Sehingga realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025 yaitu Rp 22.325.722.000,- dan Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 3.834.872.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 22.180.792.545,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan prioritas nasional (4639.RAC.053.051) dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (4639.RCC.212.051)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

- Perencanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan maupun Pemeliharaan Perlengkapan Jalan direncanakan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan hasil SID dan permohonan dari daerah;
- Pelaksanaan pekerjaan terrealisasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut
- pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan maupun pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis;
- Pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

- Melaksanakan revisi target perjanjian kinerja seiring dibukanya blokir efisiensi anggaran.

b. 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman adalah kegiatan yang meliputi identifikasi, penilaian, dan pelaksanaan intervensi penanganan terhadap Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) berdasarkan hasil analisis data kecelakaan dan kondisi geometrik jalan, yang dilakukan sesuai dengan pedoman teknis penanganan LRK yang berlaku. Tujuan utama dari kegiatan intervensi pada Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan berulang dan meningkatkan keselamatan jalan melalui perbaikan sistem serta infrastruktur secara terukur. Intervensi ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan langkah preventif berbasis data yang disusun dalam studi *Survey Investigation Design* (SID).

1) Definisi Indikator Kinerja

Intervensi Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) di ruas jalan di daerah Maluku sangat penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat di wilayah tersebut. Maluku merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, dengan banyaknya perbukitan dan lembah yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan program Intervensi Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) pada ruas jalan di kota Ambon. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, BPTD bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat di wilayah Maluku.

Dalam program LRK, BPTD melakukan identifikasi lokasi-lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan kota Ambon dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ini dapat meliputi peningkatan infrastruktur jalan, penambahan rambu-rambu keselamatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

BPTD juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk menyelenggarakan program LRK. Mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan

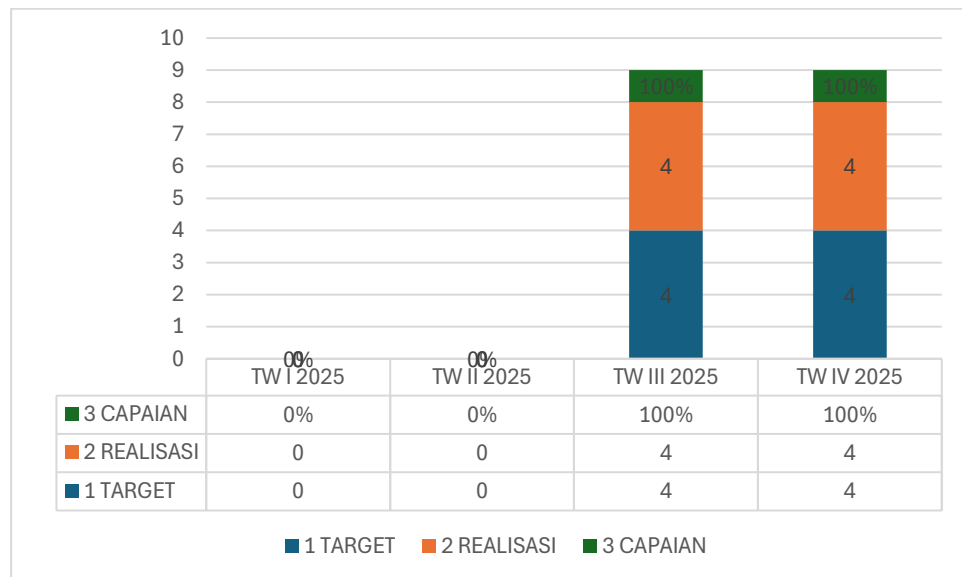
berlalu lintas dan bagaimana cara menghindari kecelakaan.

Dengan peran BPTD, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material akibat kecelakaan di ruas jalan kota Ambon. Selain itu, program LRK juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan transportasi darat di Maluku dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman sebesar 4 (Empat), jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 (Empat) maka capaian kinerja mencapai 100%

(Capaian Kinerja=(Realisasi Kinerja/Target Kinerja) x 100%).



Gambar III. 43 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur perlengkapan jalan sebagai salah satu prasarana transportasi.
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan ini mendefinisikan jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya.
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bahwa salah satu tugas dan fungsi BPTD adalah Penyusun Rencana Program dan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan,

sungai, danau dan penyeberangan. Perlengkapan Jalan BPTD Kelas I MALUKU memiliki target 1 (satu) yaitu berupa kegiatan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).

c. Faktor Keberhasilan

- Tersedianya data kecelakaan lalu lintas yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).
- Pelaksanaan intervensi penanganan LRK sesuai dengan pedoman dan standar keselamatan jalan yang berlaku.
- Tersedianya anggaran yang memadai serta perlengkapan jalan dan sarana pendukung keselamatan yang sesuai standar.
- Adanya komitmen pimpinan daerah dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan intervensi keselamatan.

d. Faktor Kegagalan

- Keterbatasan kualitas data menyebabkan kesalahan penetapan lokasi prioritas penanganan.
- Tidak mencukupinya anggaran menghambat pelaksanaan intervensi secara menyeluruh dan berkelanjutan
- Kurangnya sinergi menyebabkan keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan penanganan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dari Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman diketahui bahwa:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jml Realisasi Penanganan Pada Tahun (n)}}{\text{Jml Penanganan Yang Direncanakan}} \times 100\%$$

Sehingga realisasi Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman sebesar 100%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

maka perhitungan capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{4}{4} \times 100\%$$

Sehingga realisasi Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman sebesar 100%. Justifikasi kegiatan ini termasuk dalam blokir efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 dan baru dibuka blokir efisiensi anggaran pada bulan September, saat ini sudah selesai dilaksanakan pemeliharaan.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman Tahun 2025 yaitu Rp 1.124.018.000,- realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 1.123.872.004,- atau mencapai 100% dengan nomenklatur POK: Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (4639.RAC.053.053)

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- Memperkuat pengumpulan, validasi, dan integrasi data kecelakaan lalu lintas dari berbagai sumber sebagai dasar penetapan prioritas Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).
- Menyelaraskan perencanaan penanganan LRK dengan ketersediaan anggaran serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko dan dampak kecelakaan
- Memperkuat sinergi antara Dinas Perhubungan, penyelenggara jalan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan LRK.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas intervensi LRK, termasuk pengukuran penurunan angka dan tingkat keparahan kecelakaan.

8. SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam Sasaran Kegiatan 4 terdapat 7 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

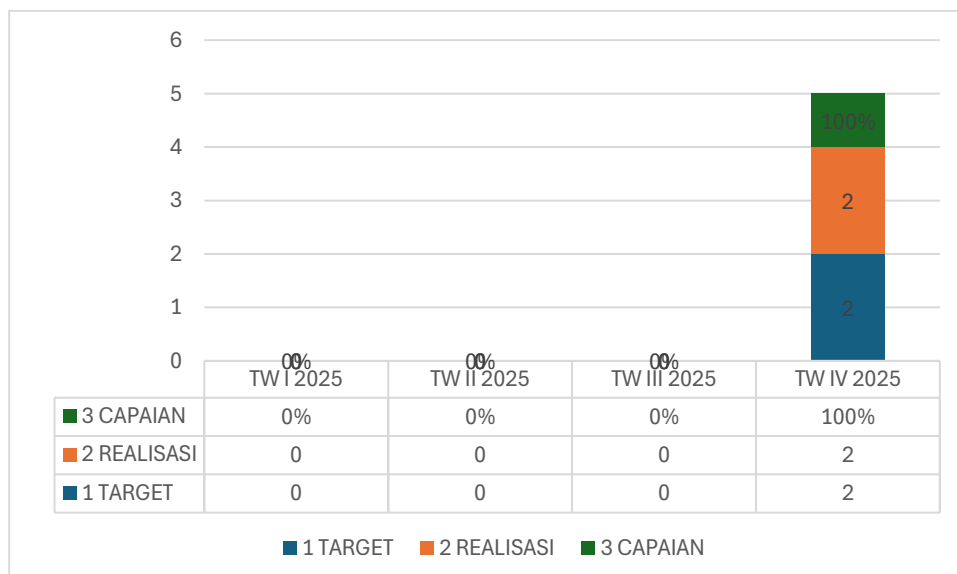
a. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I MALUKU

1) Definisi Indikator Kinerja

Perencanaan pembangunan Ditjen Perbungan Darat merupakan proses menyusun rencana program dan anggaran untuk pembangunan program dan kegiatan suatu instansi atau organisasi, kegiatan ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan suatu instansi atau organisasi agar perencanaan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu instansi atau organisasi dengan tahapan antara lain Penyusunan RKKL dan Program Pagu Kebutuhan, Penyusunan RKKL dan Program Pagu Indikatif, Penyusunan RKKL dan Program Pagu Alokasi dan Penyusunan Dokumen Renstra.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas II MALUKU sebesar 2 (Dua) jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 (Dua) maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut;



3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 245 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta perubahannya.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan memiliki target sebanyak 2 kegiatan yang diperoleh berdasarkan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja, Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

- Kegiatan perencanaan dan pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bagian Tata Usaha dengan Bidang Teknis di lingkungan BPTD Kelas II MALUKU dalam hal menyampaikan program kerja;
- Adanya dukungan dari pimpinan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang ada di lingkungan BPTD Kelas II MALUKU.

d. Faktor Kegagalan

- Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas II MALUKU :
- Kurangnya pemahaman konsep perencanaan juga dapat menghambat pelaksanaan rencana
- Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada seluruh pihak yang terlibat dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan perencanaan
- Motivasi yang rendah dari tim pelaksana dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelaksanaan perencanaan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan dalam setahun adalah 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 kegiatan maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari perhitungan berikut:

$$IKK\ 4.1 = \text{Realisasi Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat pada Provinsi Maluku}$$
$$IKK\ 4.1 = 2 \text{ Kegiatan}$$

Berikut ini merupakan realisasi kegiatan perencanaan pembangunan ditjen perhubungan darat pada provinsi Maluku:

- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (RKA-KL Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi)
- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (Penyusunan Renstra)

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu Rp2.465.222.000,-dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesarRp 994.652.881,- atau mencapai 40,35%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

- Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing Bidang dan Bagian untuk mengantisipasi penurunan pagu alokasi;
- Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Seditjen Perhubungan Darat terkait renstra Ditjen Perhubungan Darat.

b. IKK 4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

1) Definisi Indikator Kinerja

Secara sederhana, SAKIP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mengelola dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel dan transparan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu Koordinasi dan pengumpulan data real atau bahan Penyusunan dokumen SAKIP antara lain Perjanjian Kinerja, Renaksi, Monitoring Renaksi, LMCK, LKIP dan lain sebagainya.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) senilai 81,71 jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 81,71. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 49 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan memiliki target nilai 81,71 yang diperoleh berdasarkan penyusunan dokumen SAKIP dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

- Perencanaan kinerja berkualitas meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan nasional. Penilaian kinerja juga harus didasarkan pada indikator yang relevan dan realistis;
- Pengukuran kinerja yang akurat dan konsisten serta pelaporan yang jujur dan transparan kepada pemangku kepentingan;
- Pimpinan instansi yang memiliki komitmen kuat terhadap SAKIP akan mendorong kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel.

d. Faktor Kegagalan

- Kurangnya sosialisasi kebijakan akuntabilitas kinerja kepada seluruh pegawai yang menyebabkan pemahaman yang lemah dan implementasi yang tidak merata;
- Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kinerja;
- Motivasi dan komitmen yang rendah dari pimpinan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKK 4.2 = Realisasi Jumlah Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)

$$IKK\ 4.2 = 81,71$$

Berdasarkan realisasi kinerja kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) nilai SAKIP diperoleh berdasarkan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 dengan dokumen yaitu Perjanjian Kinerja, RKT, Monitoring Renaksi, LMCK dan lain sebagainya.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.2 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{81,71}{81,71} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kinerja Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) Tahun 2025 yaitu Rp 2.465.222.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 994.652.881,- atau mencapai 40,35%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan dimaksud belum terealisasi dikarenakan rencana realisasi ada pada triwulan IV adapun upaya peningkatan yang merupakan bagian proses menyelesaikan target kinerja adalah sebagai berikut : Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait;

- Menyusun dokumen-dokumen pendukung LKIP sesuai dengan tahapanya sehingga target kinerja tercapai pada Triwulan IV;
- Berkoordinasi dengan Bidang Teknis dilingkungan BPTD Kelas II MALUKU sehingga monitoring kinerja dapat sesuai dengan rencana.

c. IKK 4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis

1) Definisi Indikator Kinerja

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis merupakan sasaran/tujuan kinerja yang fokus pada upaya memperbaiki kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh BPTD Kelas II MALUKU, agar anggaran dapat terserap optimal dan memberi hasil sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Rekonsiliasi Semester, Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan lainnya).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis senilai 82,11% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 82,11% maka capaian kinerja mencapai 100% . Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 52 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Instruksi Menteri perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran melalui Sistem e-Monitoring dan Reporting di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 245 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta perubahanya

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan memiliki target nilai 82,11 yang diperoleh berdasarkan penyusunan dokumen anggaran di lingkungan BPTD Kelas II Maluku dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

- Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)
- Penyusunan RKA yang realistis, terukur, dan sesuai prioritas.
- Sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan pagu anggaran.
- Ketepatan alokasi anggaran sesuai program dan kegiatan prioritas BPTD.
- Pemanfaatan data hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan perencanaan.

d. Faktor Kegagalan

- Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun sehingga kualitas output menurun.
- Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.
- Hambatan administrasi pada proses pencairan (SPM/SP2D) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKK 4.3 = Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis dalam setahun)

$$IKK\ 4.3 = 82,11$$

Berdasarkan realisasi kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis diperoleh berdasarkan penyusunan dan evaluasi anggaran yaitu Rekonsiliasi Semester, Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan lainnya).

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.3 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{82,11}{82,11} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis Tahun 2025 yaitu Rp15.041.934.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 15.227.022.184,- atau mencapai 101,56%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada trIwulan IV adalah sebagai berikut:

- Menginventarisir kebutuhan minimal masing – masing Bidang dan Bagian untuk mengantisipasi penurunan/penambahan pagu anggaran TA.2025;
- Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Seditjen Perhubungan Darat terkait pergeseran anggaran/Realokasi anggaran/Relaksasi Buka Blokir di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan prognosa yang telah ditetapkan pada TA.2025.

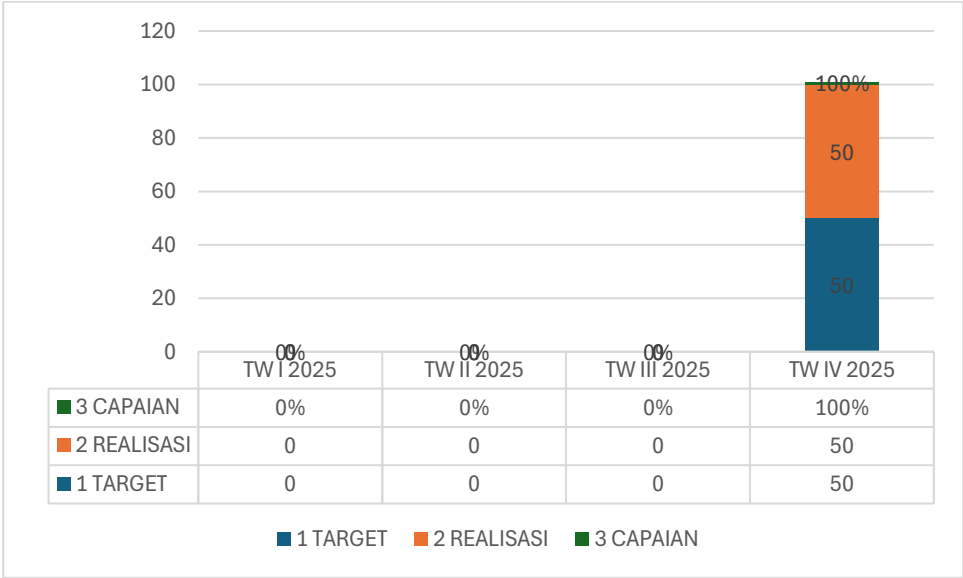
d. IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

1) Definisi Indikator Kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) merupakan saran yang diberikan oleh auditor kepada pihak yang diaudit, berdasarkan hasil temuan audit. Adapun Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) yang telah ditindak lanjuti yaitu 1 (Satu) Berita Acara Rekomendasi yang didalamnya memuat rekomendasi audit/pemeriksaan tahun 2024.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) memiliki target nilai sebesar 50% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 55 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Peraturan Perundangan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) memiliki target sebesar 50% yang diperoleh berdasarkan tindak lanjut rekomendasi audit/pemeriksaan dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit biasanya dipengaruhi oleh kombinasi komitmen manajemen, koordinasi antarunit, dan pemantauan yang efektif. Berikut adalah poin-poin utama yang sering dijadikan acuan, terutama di instansi pemerintah, yaitu:

- Komitmen pimpinan;
- Pemahaman yang jelas terhadap temuan;
- Rencana aksi (action plan) yang terukur;
- Koordinasi dan Kolaborasi antarunit

- Pemanfaatan sistem pemantauan;
- Kompetensi dan kapasitas SDM.

d. Faktor Kegagalan

Faktor atau potensi yang mempengaruhi Kegagalan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) :

- Kurangnya komitmen manajemen, pimpinan atau pihak terkait tidak memberi prioritas pada rekomendasi;
- Sumber daya terbatas, kekurangan dana, tenaga kerja, atau waktu untuk melaksanakan tindak lanjut;
- Koordinasi yang lemah, unit kerja terkait tidak memiliki alur komunikasi yang jelas;
- Pemahaman yang kurang, pihak pelaksana tidak memahami maksud atau detail rekomendasi;
- Proses dan prosedur tidak memadai, SOP tidak mendukung pelaksanaan rekomendasi dengan efektif;
- Resistensi perubahan, budaya kerja atau individu yang menolak perbaikan;
- Perubahan kebijakan/regulasi, rekomendasi tidak relevan lagi atau harus disesuaikan;
- Tidak ada sistem monitoring yang kuat, tindak lanjut terpantau secara berkala.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) dalam setahun adalah senilai 50% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 50% maka presentase capaian adalah 100%.

IKK 4.4 = Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)
IKK 4.4 = 50%

Berdasarkan realisasi kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) diperoleh dari penyusunan laporan atas Tindak Lanjut rekomendasi audit/pemeriksaan

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.4 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) Tahun 2025 yaitu Rp2.465.222.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 994.652.881,- atau mencapai 40,35%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada triwulan IV adalah sebagai berikut:

- Memperkuat komitmen pimpinan instansi;
- Membentuk tim khusus tindak lanjut;
- Meningkatkan koordinasi antarunit kerja;
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
- Memberikan pelatihan dan sosialisasi;
- Menetapkan sanksi dan insentif;
- Meningkatkan pengawasan internal.

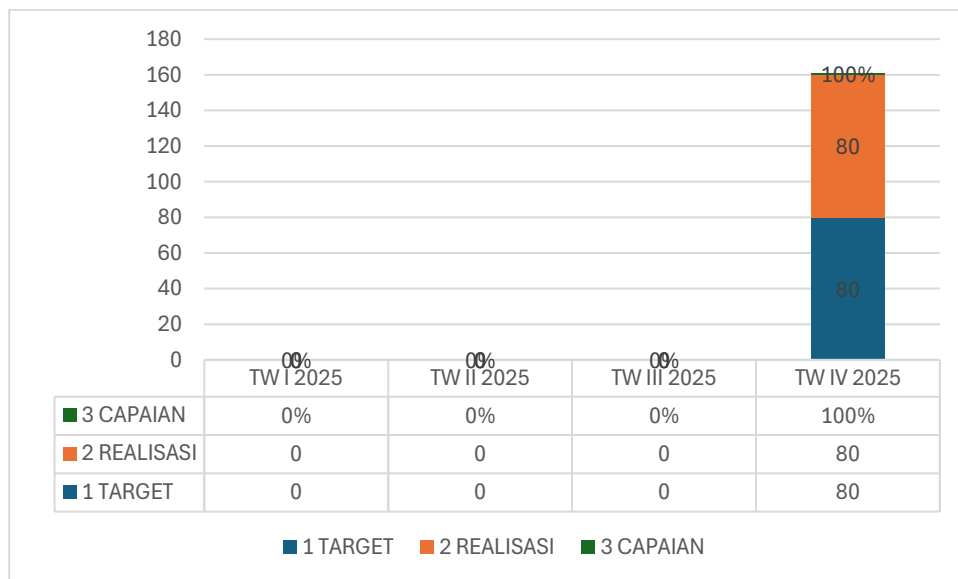
e. IKK 4.6 Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)

1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) merupakan kegiatan peningkatan integritas bagi unit kerja maupun satuan pelayanan dilingkungan BPTD Kelas II MALUKU. Adapun Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) Yaitu usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) memiliki target nilai sebesar 80% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 58 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

Regulasi terkait Zona Integritas (ZI) mencakup Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB), dengan Mahkamah Agung mahkamahagung.go.id menyebutkan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 sebagai yang terbaru, menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan ini menetapkan tahapan dan kriteria untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) memiliki target sebesar 80% yang diperoleh berdasarkan jumlah kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor keberhasilan

- Komitmen yang kuat dari pimpinan adalah faktor penentu karena pemimpin harus menjadi *role model* dan mendorong perubahan di seluruh jajaran.
- Pembentukan tim kerja yang efektif dan memiliki rencana kerja yang jelas untuk mengawal proses pembangunan ZI.
- Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme.

d. Faktor Kegagalan

- Penataan tatalaksana yang tidak efektif
- Lemahnya pengawasan internal
- Kurangnya transparansi informasi

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) adalah senilai 80% jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 80% maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari perhitungan berikut:

$$IKK\ 4.6 = \text{Realisasi Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)}$$

$$IKK\ 4.6 = 80\%$$

Sehingga realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) sebesar 100%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.6 = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kegiatan Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) Tahun 2025 yaitu Rp2.465.222.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 994.652.881,- atau mencapai 40,35%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan telah dilaksanakan, adapun rencana peningkatan di kinerja pada trIwulan IV adalah sebagai berikut:

- Manajemen perubahan
- Tingkatkan sistem manajemen SDM yang berbasis meritokrasi, dari rekrutmen hingga promosi.
- Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dan obyektif.

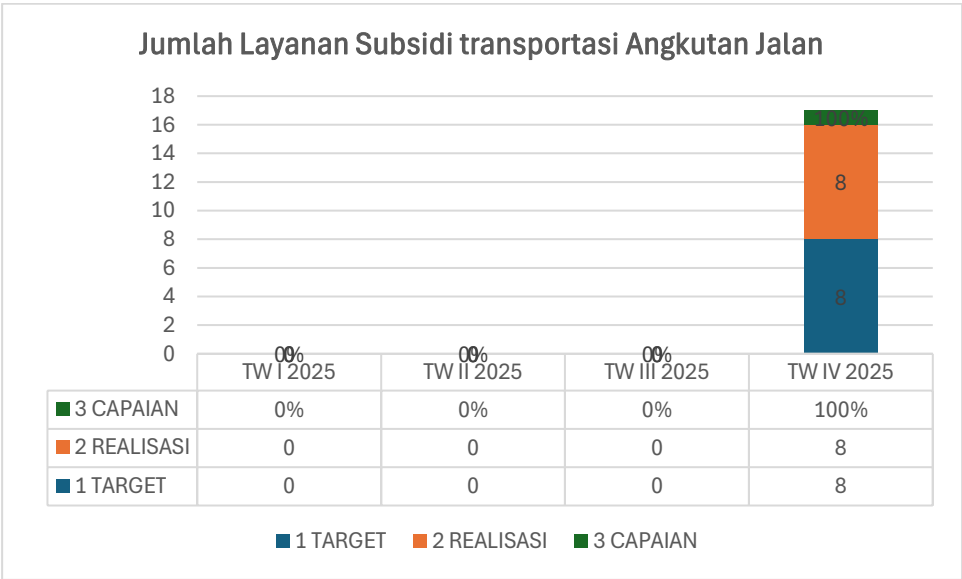
f. IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPTD Kelas II MALUKU merupakan suatu sistem pengaturan dan proses untuk memastikan pengadaan (pembelian) barang dan jasa, baik di sektor pemerintah maupun swasta, dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 8 (Delapan) kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8 (Delapan) kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%.Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 61 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum utama untuk pengelolaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan disesuaikan dengan perubahan terbaru seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini mengatur seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan, dan diperkuat dengan peraturan turunan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan memiliki target sebesar 8 kegiatan yang diperoleh berdasarkan jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain : Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen, Sumber Daya Manusia yang kompeten, dan Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran yang sebanding dengan manfaat yang diharapkan memastikan optimalisasi.

d. Faktor Kegagalan

Adapun potensi kegagalan dalam kegiatan ini antara lain : Tidak terencana secara jelas sehingga tujuan tidak terdefinisi dan strategi yang tidak matang,

Kurangnya pengalaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia, mengintegrasikan operasi, dan mengkoordinasikan kegiatan tata kelola barang dan jasa, dan anggaran yang tidak memadai sehingga kekurangan dana untuk menunjang kegiatan pengadaan, yang berisiko menyebabkan penundaan, pengurangan spesifikasi, atau bahkan kegagalan mencapai sasaran

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam setahun adalah 8 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8 kegiatan maka presentase capaian adalah 100%. Adapun realisasi kinerja diperoleh dari perhitungan berikut:

IKK 4.7 = Realisasi Jumlah Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam setahun

$$IKK\ 4.7 = 8\ kegiatan$$

Sehingga realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.7 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Rp15.041.934.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 15.227.022.184,- atau mencapai 101,56%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan dan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja, adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan Kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola pengadaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar mampu melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif, sesuai dengan perubahan regulasi dan teknologi terbaru
- Penataan Proses Pengadaan yang Efisien dan Transparan dimulai dengan perencanaan yang baik, penyederhanaan prosedur dan percepatan belanja
- Peningkatan Kolaborasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dengan cara melakukan konsolidasi pengadaan untuk mencapai efisiensi, akurasi, dan transparansi yang lebih tinggi, serta menerapkan prinsip value for money.

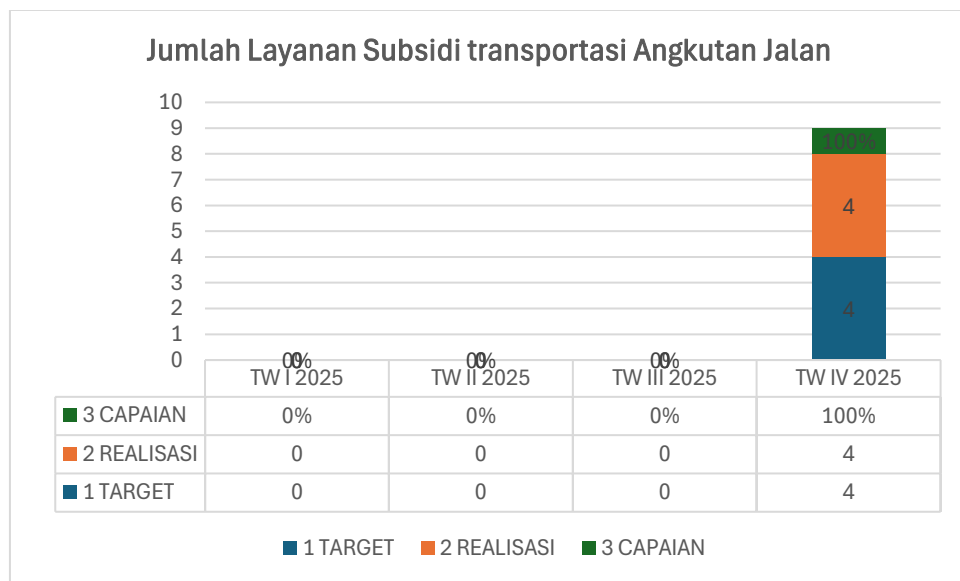
g. IKK 4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

1) Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat merupakan kegiatan rutin kepegawaian. Adapun Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat antara lain Peningkatan Kompetensi ASN, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Peta Manajemen Talenta.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 4 Kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 senilai 4 Kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:



Gambar III. 64 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (dan perubahannya, PP Nomor 17 Tahun 2020);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB).

b. Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 IKK Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan memiliki target sebesar 4 kegiatan yang diperoleh berdasarkan penyusunan sistem merit SDM dalam setahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja yang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target kinerja yang ditetapkan oleh BPTD berdasarkan beberapa hal yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Revisi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis BPTD, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Masyarakat, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Sasaran Pembangunan Nasional.

c. Faktor keberhasilan

- Pemimpin berperan penting dalam memotivasi dan menginspirasi timnya. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja, kolaborasi, dan produktivitas;
- Pemimpin memberikan keteladanan akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari timnya. Kepercayaan ini sangat penting untuk lingkungan kerja yang sehat;
- Pemimpin mampu mengelola dan menyelesaikan konflik secara bijaksana dapat mencegah ketegangan dan menjaga kekompakan tim.

d. Faktor Kegagalan

- Adapun Komunikasi yang buruk antara atasan dan staf, serta antar sesama rekan kerja, dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan konflik yang tidak terselesaikan
- Pengambilan keputusan yang tidak transparan atau tidak adil, terutama dalam hal promosi, kenaikan gaji, dan beban kerja, dapat menurunkan motivasi dan moral karyawan
- Manajemen konflik yang buruk

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian IKK Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKK 4.8 = Realisasi Jumlah Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

$$IKK\ 4.8 = 4\ Kegiatan$$

Berdasarkan realisasi kinerja Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat realisasi kegiatan diperoleh berdasarkan jumlah kegiatan dalam tahun berjalan yaitu terdapat 4 kegiatan yaitu Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Penyusunan Kebutuhan Pegawai, dan Peningkatan Kompetensi ASN

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, Perhitungan Capaian Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$IKK\ 4.8 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian IKK terkait Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

g. Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Pagu anggaran terkait Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu Rp2.465.222.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 994.652.881,- atau mencapai 40,35%.

4) Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan dan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja, adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para manajer dan supervisor untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, dan motivasi tim;

- Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang efektif, termasuk penetapan tujuan yang jelas, evaluasi berkala, dan umpan balik yang konstruktif.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran Awal Tahun 2025 Posisi 02 Desember 2024 sebesar Rp. 161.531.543.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	Rp.	141.373.880.000	99,03%
PNBP	Rp.	1.911.719.000	0,97%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	161.531.543.000	100%

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp.	11.222.080.000	7%
Belanja Barang	Rp.	125.268.844.000	77,50%
Belanja Modal	Rp.	25.040.619.000	15,50%
Total	Rp.	161.531.543.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Kelas II MALUKU Triwulan IV TA. 2025 pada Revisi DIPA ke 15 tanggal 25 Desember 2025 sehingga total pagu per 31 Desember 2025 pada DIPA BPTD Kelas II MALUKU adalah sebesar **Rp. 143.285.599.000** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	Rp.	141.373.880.000	98,67%
PNBP	Rp.	1.911.719.000	1,33%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	143.285.599.000	100%

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp.	15.041.934.000	10,50%
Belanja Barang	Rp.	97.089.246.000	67,75%
Belanja Modal	Rp.	31.154.419.000	21,75%
Total	Rp.	143.285.599.000	100%

- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2025

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2024 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Awal);
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 22 Februari 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 01);
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 02);
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 23 April 2024 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 03);
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 27 Mei 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 04);
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 05);
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 06);
- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 07);

- i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 08);
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 09);
- k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 10);
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 11);
- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 12);
- n. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 13);
- o. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 14);
- p. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA- 022.03.2.403865/2025 Tanggal 02 Desember 2025 perihal Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku TA. 2025 (DIPA Revisi ke 15);

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

• Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI I	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI II	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI III	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI IV	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI V	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI VI	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI VII	159.970.624.000	1.560.919.000		161.531.543.000
REVISI VIII	163.350.724.000	1.560.919.000		164.911.643.000
REVISI IX	163.350.724.000	1.560.919.000		164.911.643.000
REVISI X	164.335.766.000	1.911.719.000		166.247.485.000
REVISI XI	164.335.766.000	1.911.719.000		166.247.485.000
REVISI XII	164.335.766.000	1.911.719.000		166.247.485.000
REVISI XIII	142.899.126.000	1.911.719.000		144.810.845.000
REVISI XIV	141.373.880.000	1.911.719.000		143.285.599.000

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGUA WAL	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI I	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI II	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI III	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI IV	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI V	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI VI	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI VII	11.222.080.000	125.268.844.000	25.040.619.000	161.531.543.000
REVISI VIII	16.567.180.000	123.303.844.000	25.040.619.000	164.911.643.000
REVISI IX	16.567.180.000	123.303.844.000	25.040.619.000	164.911.643.000
REVISI X	16.567.180.000	118.796.686.000	30.883.619.000	166.247.485.000
REVISI XI	16.567.180.000	118.525.886.000	31.154.419.000	166.247.485.000
REVISI XII	16.567.180.000	118.525.886.000	31.154.419.000	166.247.485.000
REVISI XIII	16.567.180.000	97.089.246.000	31.154.419.000	144.810.845.000
REVISI XIV	15.041.934.000	97.089.246.000	31.154.419.000	143.285.599.000
REVISI XV	15.041.934.000	97.089.246.000	31.154.419.000	143.285.599.000

• Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	11.222.080.000	-	11.222.080.000	-	11.222.080.000	5.345.100.000	16.567.180.000	1.525.246.000	15.041.934.000
Belanja Barang	125.268.844.000	-	125.268.844.000	-	125.268.844.000	(6.742.958.000)	118.525.886.000	21.436.640.000	97.089.246.000
•RM	123.907.925.000	-	123.907.925.000	-	123.907.925.000	6.822.958.000	117.084.967.000	21.436.640.000	95.648.327.000
•PNBP	1.360.919.000	-	1.360.919.000	-	1.360.919.000	80.000.000	1.440.919.000	-	1.440.919.000
Belanja Modal	25.040.619.000	-	25.040.619.000	-	25.040.619.000	-	31.154.419.000	-	31.154.419.000
•RM	24.840.619.000	-	24.840.619.000	-	24.840.619.000	5.843.000.000	30.683.619.000	-	30.683.619.000
•PNBP	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	270.800.000	470.800.000	-	470.800.000
TOTAL	161.531.543.000	-	161.531.543.000	-	161.531.543.000	4.715.942.000	166.247.485.000	(22.961.886.000)	143.285.599.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN .III	TRIWULAN .III		PAGU PER TRIWULAN .IV	TRIWULAN .IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku	161.531.543.000	161.531.543.000	8.863.210.093	5,48%	161.531.543.000	29.459.273.777	18,23%	166.247.485.000	48.579.110.145	29,22%	143.285.599.000	101.303.754.385	70,70%
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	142.411.757.000	142.411.757.000	4.811.902.153	3,37%	142.411.757.000	21.245.916.271	14,91%	141.848.903.000	34.675.119.191	24,44%	120.412.263.000	80.690.689.275	67,01%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	95.029.524.000	95.029.524.000	2.814.121,185	2,96%	95.029.524.000	18,163,129,377	19,11%	86.368.566.000	29,114,659,554	33,70%	64.931.926.000	60,153,260,830	92.64%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	4.122.568.000	4.122.568.000	877,038,735	21,27%	4.122.568.000	1,642,237,791	39,83%	2.910.428.000	2,013,634,726	69,18%	2.910.428.000	2,632,695,110	90.46%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	20.748.827.000	20.748.827.000	409,618,814	1,97%	20.748.827.000	759,174,186	3,65%	28.959.071.000	2,585,738,067	8,92%	28.959.071.000	15,544,937,873	53.68%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	22.510.838.000	22.510.838.000	711,123,419	3,15%	22.510.838.000	681,374,917	3,02%	23.610.838.000	961,086,844	4,07%	23.610.838.000	2,359,795,462	9.99%
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	19.119.786.000	19.119.786.000	4.051.307.940	21,18%	19.119.786.000	8.213.357.506	42,95%	24.398.582.000	13.903.990.954	56,98%	22.873.336.000	20.604.965.110	99,26%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	100.000.000	100.000.000	8,100,000	8,10%	100.000.000	8,100,000	8,10%	100.000.000	8,100,000	8,10%	100.000.000	8,100,000	8,10%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.797.706.000	7.797.706.000	1,860,668,533	23,86%	7.797.706.000	3,246,921,632	41,63%	7.731.402.000	4,737,451,327	61,27%	7.731.402.000	7,028,621,614	90.91%
4670	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	11.222.080.000	11.222.080.000	2,182,539,407	19,44%	11.222.080.000	4,958,335,874	44,18%	16.567.180.000	9,158,439,627	55,28%	15.041.934.000	13,576,343,496	90.26%

- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

N0	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI	TRIWULAN II		PAGU ALOKASI	TRIWULAN III		PAGU ALOKASI	TRIWULAN IV	
		TRIWULAN I	REALISASI	%	TRIWULAN II	REALISASI	%	TRIWULAN III	REALISASI	%	TRIWULAN IV	REALISASI	%
1	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RUPIAH MURNI	159970624000	8863210093	5,54	159970624000	29459273777	18,42	164335766000	48534760761	29,53	141373880000	100970773126	71,42
3	PNBP	1560919000	0	0	1560919000	0	0	1911719000	44349384	2,32	1911719000	332981259	17,42
TOTAL		161531543000	8863210093	5,49	161531543000	29459273777	18,24	166247485000	48579110145	29,22	143285599000	101303754385	70,70

- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

N0	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI	TRIWULAN II		PAGU ALOKASI	TRIWULAN III		PAGU ALOKASI	TRIWULAN IV	
		TRIWULAN I	REALISASI	%	TRIWULAN II	REALISASI	%	TRIWULAN III	REALISASI	%	TRIWULAN IV	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	11222080000	2182539407	19,45	11222080000	4958335874	44,18	16567180000	9158439627	55,28	15041934000	13576343496	90,26
2	Belanja Barang	125268844000	6672570686	5,33	125268844000	24487887903	19,55	118525886000	38585972521	32,55	97089246000	78748280767	81,11
3	Belanja Modal	25040619000	8100000	0,03	25040619000	13050000	0,05	31154419000	834697997	2,68	31154419000	8979130122	28,82
TOTAL		161531543000	8863210093	5,49	161531543000	29459273777	18,24	166247485000	48579110145	29,22	143285599000	101303754385	70,70

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif walaupun belum maksimal, anggaran yang bersumber dana PNBPN sudah tersedia.

- Analisis Dana yang Tidak Terserap

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh BPTD Kelas I MALUKU berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW I	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	11222080000	2182539407	9.039.540.593
2	Belanja Barang	125268844000	6672570686	118.596.273.314
3	Belanja Modal	25040619000	8100000	25.032.519.000
TOTAL		161.531.543.000	8.863.210.093	152.668.332.907

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW II	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	11.222.080.000	4.958.335.874	6.263.744.126
2	Belanja Barang	125.268.844.000	24.487.887.903	100.780.956.097
3	Belanja Modal	25.040.619.000	13.050.000	25.027.569.000
TOTAL		161.531.543.000	29.459.273.777	132.072.269.223

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW III	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	16567180000	9158439627	7.408.740.373
2	Belanja Barang	118525886000	38585972521	79.939.913.479
3	Belanja Modal	31154419000	834697997	30.319.721.003
TOTAL		166247485000	48579110145	117.668.374.855

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW IV	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	15041934000	13.576.343.496	1.465.590.504
2	Belanja Barang	97089246000	78748280767	18.340.965.233
3	Belanja Modal	31154419000	8.979.130.122	22.175.288.878
TOTAL		143285599000	101.303.754.385	41.981.844.615

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU TW I	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	159.970.624.000	8.863.210.093	151.107.413.907
2	PNBP	1.560.919.000	0	1.560.919.000
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		161.531.543.000	8.863.210.093	152.668.332.907

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan II Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU TW II	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	159.970.624.000	29.459.273.777	130.511.350.223
2	PNBP	1.560.919.000	0	1.560.919.000
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		161.531.543.000	29.459.273.777	132.072.269.223

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan III Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU TW III	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	164335766000	48534760761	115.801.005.239
2	PNBP	1911719000	44349384	1.867.369.616
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		166.247.485.000	48.579.110.145	117.668.374.855

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU TW IV	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	141373880000	100970773126	40.403.106.874
2	PNBP	1911719000	332981259	1.578.737.741
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		143.285.599.000	101.303.754.385	41.981.844.615

Dari total pagu anggaran BPTD Kelas II MALUKU sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 143.285.599.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 101.303.754.385,- (Seratus Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Lima Rupiah) atau sebesar 70.70%, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap di lingkungan BPTD Kelas II Maluku adalah sebesar Rp 41.981.844.615,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 29,30%.

III.3.2 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih dalam realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan Suber Daya Manusia yang berkompeten dibidang dan fungsinya.
2. Pengumpulan data kinerja dari setiap seksi masih sering telat sehingga tim mengalami kesulitan dalam menganalisis keberhasilan capaian untuk menyusun laporan kinerja.
3. Sebagian anggaran terblokir karena adanya efisiensi anggaran.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

1. Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II MALUKU serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2025, yakni merupakan pelaksanaan tahun kelima, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 19 (Sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang telah disesuaikan dengan revisi terbaru. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada LKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 11 trayek dari target Tahun 2025 11 trayek;
 - b. Pelaksanaan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebesar 24 lintasan dari target Tahun 2025 24 lintasan;
 - c. Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor Sesuai SPM terealisasi sebanyak 1 lokasi dari target Tahun 2025 1 Lokasi;
 - d. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ terealisasi sebanyak 3 kegiatan dari target Tahun 2025 3 kegiatan;

- e. Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM sebesar 33 lokasi dari target Tahun 2025 33 lokasi;
- f. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang terealisasi sebanyak 4 kegiatan dari target Tahun 2025 4 kegiatan;
- g. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman terealisasi sebanyak 1 kegiatan dari target Tahun 2025 1 kegiatan;
- h. Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi terealisasi sebanyak 1 kegiatan dari target Tahun 2025 1 kegiatan;
- i. Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan Sesuai dengan Spesifikasi Teknis terealisasi sebanyak 100% dari target Tahun 2025 100% ;
- j. Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman terealisasi sebanyak 4 lokasi dari target Tahun 2025 4 lokasi;
- k. Kegiatan Perencanaan Pembangunan BPTD Kelas I MALUKU terealisasi sebanyak 2 kegiatan dari target Tahun 2025 2 kegiatan;
- l. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP) terealisasi dengan nilai 81,7 dari target Tahun 2025 dengan nilai 81,7;
- m. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis terealisasi dengan persentase 82,11% dari target Tahun 2025 dengan persentase 82,11%;
- n. Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) terealisasi dengan persentase 50% dari target Tahun 2025 dengan persentase 50%;
- o. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE) terealisasi dengan nilai 80 dari target Tahun 2025 dengan nilai 80;
- p. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 8 kegiatan dari target Tahun 2025 8 kegiatan;
- q. Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) terealisasi sebanyak 4 kegiatan dari target Tahun 2025 4 kegiatan.

2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I MALUKU senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
3. Realisasi pencapaian kinerja BPTD Kelas II MALUKU sangat baik, dengan rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan ini sebesar 100% dari target keseluruhan sasaran kegiatan Tahun 2025 namun untuk anggaran tidak tercapai 100% dikarenakan adanya blokir efisiensi anggaran.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab Laporan Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas I MALUKU Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dibawah ini :

